

# WACANA TENTANG PKI DALAM DUA FILM DOKUMENTER PASCA ORDE BARU KARYA IGP WIRANEGARA

Dwi Masrina<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Airlangga, Jalan Airlangga No. 4-6 Gubeng, Surabaya 60115, Indonesia

---

## Abstract

This research is about the discourse of PKI which is conveyed through emerging figures in two documentary movies in post-New Order. The theme of this research interests the writer since so long the main frame of rethoric-logic used in questioning PKI is as what has been narated in the movie of *Pengkhianatan G 30 S/ PKI* (1984), the dioramas in *Lubang Buaya* and historical texts through New Order.

This research uses the method of *film discourse interpretation* which involves the aspects of language structures in the movie to reveal the underlying meanings of movie texts. Therefore, this research results the whole analysis of the *discourse* of PKI in both documentary movies.

The text reading result, in documentary movies *Menyemai Terang dalam Kelam* (2006) and *Tumbuh dalam Badai* (2007) with the *film discourse interpretation* method by Janina Wildfeuer (2014), shows an offer of different discursive formation from the official version by the New Order reign about PKI.

In the documentary movie of *Menyemai Terang dalam Kelam* (2006), the extapols and the survivors of the tragedy of 1965 and 1965/1966 are described not as the antagonists but the victims of the tyranny of New Order reign. In the meantime, the documentary movie of *Tumbuh dalam Badai* (2007) describes that the descendants of extapols suffer stigmatization and offspring discrimination by their parents.

In the democratic contemporary era of Indonesia, the discourse of PKI often appears *prejudicially* and labelled with negative *stereotype*. For the millenial generation, PKI is something alien. However the ease of information access results in different claims of PKI acknowledgements from different sources and of course with hundreds of thousands of different perspectives about PKI along with the tragedy of 1965 and 1965/1966. Thus, the presentation of these movies gives a whole new knowledge that there is, actually, a different historical story after the tragedy of 1965 that can be used as the source of thoughts before taking any conclusion.

**Keywords:** *Documentary movie, Film discourse interpretation, PKI, Post-New Order*

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dengan segala kompleksitasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tahun 1965 dan 1966 adalah tahun-tahun berdarah yang bisa dikatakan sebagai sejarah kelam yang mengawal perkembangan negeri ini. Menurut teks-teks sejarah Indonesia, hal ini diawali dengan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap Pemerintah Indonesia. Puncaknya adalah ketika PKI dipercaya sebagai dalang di balik penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira menengah Angkatan Darat demi merebut kekuasaan pemerintahan yang ada dan mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme pada tahun 1965. Reaksi kemarahan muncul, di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, anggota-anggota PKI yang dianggap bertanggung jawab kemudian ditangkap. Banyak diantaranya yang dibunuh tanpa diadili terlebih dahulu. Namun begitu, banyak spekulasi yang berkembang mengenai kejadian tersebut hingga sekarang.

Pada tahun 1985, Tempo (Kurniawan *et al.*, 2014:161) melakukan survei kepada 900 responden di Pulau Jawa dan Sumatra mengenai ancaman apa yang dianggap paling berbahaya di Indonesia. Survei tersebut menemukan bahwa bangkitnya komunisme di Indonesia adalah hal yang paling ditakuti. Selanjutnya pada September 2000, Tempo kembali membuat sebuah survei untuk mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia membangun pemahaman mereka mengenai tragedi 1965. Dari survei yang dilakukan terhadap 1.000 lebih responden yang merupakan siswa-siswi sekolah dari 3 kota besar di Indonesia; Jakarta, Surabaya dan Medan, memberikan hasil yang mengejutkan, 90 persen responden belajar tentang sejarah 1965 dari film. Sedangkan pada tahun 2002 dan 2003, Kompas melakukan jajak pendapat serupa dan hasilnya hampir mirip dengan temuan Tempo.

Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Dalam konteks ini, film tidak hanya dipandang sebagai sebuah karya seni ataupun hiburan namun dimaknai sebagai sebuah medium komunikasi yang akan memberikan efek yaitu perubahan aspek kognitif, afektif, perilaku, dan perubahan sosial pada masyarakat. Sebagai sebuah medium, film juga mencerminkan ideologi dari pembuatnya yaitu produser, sutradara, dan atau penulis cerita. Dengan kata lain, film (sebagai sebuah teks), dianggap sebagai sarana atau media di mana satu kelompok mengunggulkan dirinya dan memarjinalkan kelompok lain (Tamin & Cahyani, 2015).

Rezim Soeharto merekonstruksi peristiwa tahun 1965-1966 dengan memproduksi sebuah film propaganda berjudul *Pengkhianatan G-30-S PKI* (1984) yang mempergunakan sudut pandang Soeharto. Selama Orde Baru, setiap tanggal 30 September semua peserta didik diwajibkan untuk menyaksikan film tersebut. Namun sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru, film tersebut berhenti ditayangkan di bioskop dan televisi nasional.

Pasca Orde Baru tumbang keran informasi terbuka dengan lebar, kebebasan berpendapat bukanlah menjadi hal yang tabu lagi. Menanggapi hal tersebut beberapa anggota masyarakat mulai bersuara mengenai topik ini. Seperti melakukan penerbitan sejumlah buku dan pembuatan film yang berisi kesaksian para eks-tapol PKI mengenai *peristiwa 1965* dan *tragedi 1965/1966*.

Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (LKK) adalah sebuah publisher yang diketuai oleh Putu Oka Sukanta, seorang eks-tapol PKI yang saat Orde Baru merupakan anggota aktif Lekra. LKK *concern* dengan isu-isu seputar Orde Baru, khususnya isu-isu yang melingkupi PKI. LKK aktif dalam menerbitkan buku-buku dan memproduksi beberapa film dokumenter mengenai isu tersebut.

*Menyemai Terang Dalam Kelam* dan *Tumbuh Dalam Badai* adalah dua film dokumenter garapan IGP Wiranegara yang diproduksi tahun 2006 dan 2007. Film ini diproduksi di bawah bendera Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (LKK) pimpinan Putu Oka Sukanta. Kedua film ini memberikan sudut pandang lain dalam melihat peristiwa 1965 dan tragedi 1965/1966. Akan sangat terburu-buru jika dikatakan bahwa film ini sebagai media pelurus sejarah. Namun akan lebih tepat disebut sebagai potongan yang melengkapi sejarah Indonesia.

## **2. Kerangka Teori**

### **2.1 Film dan Representasi**

Film tidak hanya dimaknai sebagai sebuah karya seni ataupun sebagai media hiburan saja, melainkan sebagai sebuah medium komunikasi yang beroperasi di dalam tatanan masyarakat. Film dianggap sebagai medium sempurna untuk merepresentasikan dan mengkonstruksi realitas kehidupan yang bebas dari konflik-konflik ideologis serta berperan serta dalam pelestarian budaya bangsa. Film menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita, drama, humor, panggung, musik, dan trik teknis bagi konsumsi populer. Turner dalam Irawanto (1999:14) menyatakan bahwa film sebagai representasi dari realitas masyarakat yang menjadi potret dari realitas masyarakat di mana film itu dibuat dan dihadirkan kembali dalam bentuk realitas masyarakat berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaan ke layar lebar.

Representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, atau suatu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam sebuah film. Eriyanto (2009:113-114) menyatakan bahwa representasi ini penting dalam dua hal. Pertama, apakah seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya. Kata semestinya ini mengacu pada apakah seseorang atau kelompok itu ditampilkan apa adanya ataukah diburukkan. Kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan. Dengan kata, kalimat, aksentuasi dan bantuan gambar seperti apa seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan. Dengan kata lain, film -sebagai sebuah teks yang dimaknai dalam interaksinya dengan khalayak, bisa digunakan sebagai sarana atau media melalui mana satu kelompok mengunggulkan diri sendiri dan memarjinalkan kelompok lain dengan menggunakan representasi (Cahyani dan Tamim, 2015).

### **2.2 Wacana Tentang PKI Orde Baru dan Pasca Orde Baru**

Puncak kebencian terhadap PKI diawali ketika negara mengumumkan bahwa PKI hendak melakukan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia sekaligus bertanggung jawab terhadap kematian 7 perwira tinggi TNI. Seluruh anggota PKI dan sekutu-sekutunya tanpa kecuali dianggap bertanggung jawab, termasuk anak keturunannya. Berbekal Supersemar, Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai seorang Jenderal TNI, menangkapi setiap orang yang dirasa dan dianggap PKI atau memiliki keterkaitan dengan PKI. Tanpa melalui proses pengadilan, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dalam waktu singkat penjara-penjara menjadi penuh oleh tapol-tapol (tahanan politik) PKI.

Pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto menandatangani Dekrit Presiden 1/3/1966 yang menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, juga menyatakan perintah untuk membubarkan seluruh strukturnya dari pusat sampai ke daerah, termasuk organisasi-organisasi yang berasosiasi dan berkaitan dengan PKI (IPT, 2017:250). Di akhir tahun 1970, sejumlah kecil para tapol 1965/1966 dibebaskan (Kurosawa *et al.*, 2015:219). Mereka yang telah bebas dan keluarganya diberikan kartu tanda penduduk khusus yang mencirikan bahwa mereka adalah bagian dari PKI, yaitu tanda ET (atau Eks-Tapol) di KTP mereka. Banyak perlakuan diskriminatif yang mereka terima. Seperti pengucilan dalam kehidupan sosial dan pencabutan terhadap hak-hak sipil, seperti akses pekerjaan di institusi-institusi tertentu, terutama institusi pemerintahan.

Pada tahun 1982, pemerintah memproduksi sebuah film drama propaganda yang berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI* dengan mendapuk Arifin C. Noor sebagai sutradara. Film drama berdurasi 4 jam ini berfokus pada cerita penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi TNI di daerah Lubang Buaya oleh para anggota PKI serta ketangkasan dan kesigapan Soeharto dalam menangani situasi krisis tersebut.

Film ini selesai pada tahun 1984 kemudian dijadikan tontonan resmi setiap tanggal 30 September, sehari setelahnya dilakukan upacara untuk menghormati Pancasila, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, pemerintah Orde Baru membangun diorama di daerah Lubang Buaya yang serupa dengan beberapa adegan inti di dalam film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Juga mendirikan tugu peringatan yang diperuntukkan untuk mengenang 7 Perwira Tinggi TNI yang gugur di Lubang Buaya.

Orde Baru berakhir pada tahun 1998 ketika Soeharto berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dia memerintahkan untuk membebaskan eks-tapol PKI yang telah berusia lanjut dengan alasan kemanusiaan. Kemudian di masa itu pula, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah memerintahkan penghentian publikasi film *Pengkhianatan G-30-S PKI* (1984), yang dahulunya harus disiarkan setiap tanggal 30 September.

Pada masa Abdurrahman Wahid menjadi presiden, beberapa prakarsa diambil seperti permintaan maaf oleh Abdurrahman Wahid kepada para korban pembantaian massal tahun 1965-1966 atas peran anggota organisasi massa Nahdlatul Ulama, khususnya Pemuda Ansor, dalam kekerasan tersebut. Abdurrahman Wahid juga mempersilakan orang-orang yang terpaksa tinggal di luar negeri dan tak bisa kembali ke tanah air pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965, untuk pulang ke Indonesia. Abdurrahman Wahid kemudian mengusulkan pencabutan TAP MPRS/No. 25 Tahun 1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran Komunisme/ Marxisme/ Leninisme. Prakarsa terakhir ini batal dilaksanakan karena menimbulkan gelombang penolakan dari sebagian anggota DPR dan beberapa kelompok di masyarakat (Purwantari, 2010:2).

Namun tumbangnya orde baru masih menyisakan *komunistophobia* yang kuat di masyarakat Indonesia. Dilansir dari suara pembaharuan (2001), pada tanggal 19 April 2001 sebuah organisasi yang menamakan diri Aliansi Anti Komunis, sebelum menyatakan akan melakukan *sweeping* dan membakar semua buku-buku 'kiri', menyulut api dan membakar sebuah buku karangan Prof. Magnis berjudul *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*". Gerakan itu, dilandasi oleh alasan bahwa karena pemerintah saat itu tidak menjalankan TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan penyebarluasan Marxisme-Leninisme.

Walaupun di tahun-tahun tersebut banyak pelarangan terhadap peredaran beberapa buku yang dianggap kiri, namun banyak pula karya-karya berupa film-film dokumenter berbau kiri ataupun film-film komersial yang menyusupkan beberapa tema kiri ke dalamnya yang mencuat ke permukaan. Contohnya adalah film dokumenter *Menyemai Terang dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh dalam Badai* (2007).

### 2.3 Film Dokumenter

Bill Nichols (dalam Casebier, 1991) mengajukan dua proposisi ketika berbicara mengenai film dokumenter dan etnografi: *What you see is what there was. What there was is what there would have been.* (Apa yang Anda lihat adalah apa yang terjadi. Apa yang terjadi adalah apa yang akan berlangsung [di dalam film tersebut]). Proposisi "*what you see is what there was*", mengajak kita untuk meyakini bahwa akses khalayak terhadap peristiwa *pro-filmic event* itu utuh dan tidak dimediasikan. Artinya, persepsi yang dibangun oleh khalayak mengenai peristiwa yang diangkat melalui film tersebut tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh kamera ataupun aspek sinematik lainnya – *what there was is what there would have been.*

Sebagaimana diucapkan Nichols, Michael Renov (dalam Casebier, 1991) menyatakan bahwa film dokumenter mengklaim dari sisi ontologis sebagai suatu yang "riil", berbeda dengan film fiksi yang merupakan "ilusi dari realitas". Sebatas khayalan dalam tingkatan tertentu. Dengan klaim ini, Renov bermaksud menyatakan bahwa film dokumenter menampilkan kehadiran (secara metafisik) dari peristiwa dan tema yang sedang diangkat kemudian mengingkari adanya intervensi konkrit dan historis yang merupakan bagian dari keseluruhan praktik sosial.

Karakteristik kunci yang ditawarkan oleh film dokumenter menurut Renov adalah kehadiran (*presence*): *the referent of the documentary being present in the experience of the documentary.* Ketika sebuah objek dihadirkan dalam realitas film, maka dengan sendirinya objek akan berada dalam realitas, dan dengan demikian, objek tidak termodifikasi oleh kondisi penerimaan (*the conditions of reception*) dan oleh aspek sinematografi, editing, dan aspek-aspek sinematik lainnya.

Pada akhirnya, setiap dokumenter akan mencoba mengajukan "klaim-kebenaran"-nya masing-masing dan memposisikan diri mereka dalam hubungannya dengan sejarah. Begitu juga dengan film-film dokumenter mengenai tragedi 1965/1966 yang diproduksi pada masa dan pasca Orde Baru, masing-masing mencoba untuk mengajukan klaim kebenaran sejarahnya. Klaim-klaim ini akan saling berkontestasi dalam interaksinya dengan khalayak. Dalam konteks inilah, "pembacaan teks" menjadi proses penting yang menentukan klaim-kebenaran siapa yang akan memenangkan pertarungan di medan wacana ini (Cahyani dan Tamim, 2015:15).

### 3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode *film discourse interpretation* dari Janina Wildefeur (2014) untuk mengeksplorasi teks film dokumenter Indonesia bertema tragedi 1965/1966 yaitu *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007) karya IGP Wiranegara dalam menampilkan representasi PKI di Indonesia kini melalui narasi-narasi di dalam film. Perbedaan metode *film discourse interpretation* dibandingkan metode lain yang biasa digunakan pada ranah studi film terletak pada tahapannya dalam menganalisis film.

Tahap pertama yaitu *formal description*, penulis berfokus pada analisis keterkaitan antar elemen dalam film dokumenter Indonesia bertema tragedi 1965/1966 yaitu *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007), seperti gambar, penempatan kamera, dialog dan sebagainya. Hasil interpretasi keterkaitan antar elemen pada dua film tersebut kemudian dikaitkan dengan aspek sistem bahasa dan konteks sosial yang melingkupinya. Kedua aspek tersebut merupakan bagian dari *functional analysis* sebagai tahap kedua dalam *film wacana interpretation*. Dengan demikian, hasil interpretasi yang didapat nantinya bersifat komprehensif karena tidak sebatas pada analisis struktur bahasa film tetapi juga makna-makna laten film (Fitranisa, 2016:36).

Selain itu untuk melengkapi data, penulis juga mewawancarai sutradara film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007) yaitu IGP Wiranegara dan 10 anak muda yang yang lahir antara tahun 1990 hingga 2000, sedang menjalani studi dari jenjang SMA hingga Magister dan memiliki konsumsi informasi yang tinggi melalui internet.

### 4. Temuan Penelitian

Penulis mengeksplorasi wacana tentang PKI melalui narasi-narasi yang dituturkan eks-tapol 1966 mengenai kehidupan sosial politik yang mereka hadapi ketika Orba dan Pasca-Orba yang diartikulasikan melalui keterangan informan-informan dan sketsa-sketsa *reenactment* yang terdapat di dalam film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006).

Kehidupan ketika Orba dan Pasca Orba bagi para eks-tapol dan penyintas tragedi 1965/1966 tidaklah mudah. Stigma yang telah terlanjur terbangun dan melekat erat dalam tiap individu tidak mudah hilang dan dilupakan begitu saja oleh masyarakat Indonesia. Baik mereka yang mengetahui sendiri peristiwa tersebut atau yang hanya sekedar membaca dan mengetahui sejarah tersebut dari mulut kedua dan seterusnya.

Peristiwa 1965 dan tragedi 1965/1966 merupakan salah satu sejarah kelam Indonesia yang dipenuhi rahasia dan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab hingga sekarang (Kurosawa *et al.*, 2015:217). Pasca runtuhnya Soeharto, peristiwa 1965 dan tragedi 1965/1966 menjadi salah satu tema yang cukup sering diangkat untuk dibahas di layar sinema. Melalui film dokumenter dengan berbagai sudut pandang, ataupun sekedar dipakai sebagai latar bercerita di dalam film komersial. Walaupun peristiwa 1965 dan tragedi 1965/1966 yang paling dipercaya adalah versi Orde Baru yaitu seperti apa yang dinarasikan oleh film *Pengkhianatan G30S/PKI* (1984), pada prosesnya di masyarakat muncul banyak versi cerita dengan berbagai macam sudut pandang. Keragaman versi yang muncul kemudian, merupakan akibat nyata dari terbukanya keran kebebasan berbicara dan berpendapat Pasca Orde Baru tumbang.

Film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) adalah salah satunya. Film ini menyajikan 24 orang informan. 20 di antaranya adalah pelaku sejarah yang merupakan eks-tapol maupun penyintas di dalam tragedi 1965/1966 juga keturunan para penyintas yang menyaksikan bagaimana orang tua mereka mengalami penyiksaan fisik, mental dan sosial. Mereka memberikan penuturan mengenai pengalaman-pengalamannya dan sikap-sikap yang mereka ambil selama ditandai sebagai anggota PKI sepanjang Orde Baru dan selepas Orde Baru tersebut tumbang. Dengan banyaknya perlakuan buruk dan stigma negatif yang mereka terima, dari sanksi administratif hingga sanksi sosial yang kemudian memberikan mereka pemakluman atas diskriminasi yang mereka terima dan kerelaan dalam menjalani hidup di dalam diskriminasi tersebut. 4 narasumber lainnya merupakan kalangan akademisi juga ulama yang memberikan pendapat perihal eks-tapol dan penyintas tragedi 1965/1966 maupun beragam kejadian yang mereka alami.

Dari keterangan-keterangan yang dituturkan para informan di dalam film yaitu oleh ekstapol, penyintas, keluarga ekstapol, ulama, pengamat politik, serajahwan dan pengacara, bahwa stigma buruk yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru sudah melekat dan susah untuk dikikis. Negara dengan berbagai otoritasnya memiliki andil dalam melanggengkan stigma tersebut dengan menerbitkan produk-produk hukum yang dijalankan dengan bantuan aparat keamanan.

Penulis selanjutnya mengkaji wacana keturunan eks-tapol PKI yang dihadirkan dalam film dokumenter *Tumbuh Dalam Badai* (2007) melalui keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diberikan oleh para anak keturunan PKI tersebut. Conroe (2012:126) dalam disertasinya menuliskan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia percaya anak PKI memiliki potensi untuk menggoyahkan stabilitas negara atau bergerak mundur ke sejarah buruk di masa lalu Indonesia walaupun mereka adalah figur marginal.

Anak keturunan PKI seringkali disamakan juga memiliki ideologi komunisme seperti orang tua mereka. Sebagaimana diungkapkan Eep Saifullah dalam film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) bahwa dalam tragedi 1965-1966 berlaku hukum geneologi, yaitu sesiapaupun yang memiliki orang tua anggota PKI atau dituduh atau dianggap PKI maka keturunannya juga merupakan bagian dari PKI itu sendiri. Seolah PKI adalah

keadaan biologis dan mengalir dalam darah setiap keturunan. Banyak esai dan buku-buku yang ditulis untuk menceritakan pengalaman anak-anak PKI yang mengalami stigma geneologi akan ideologi yang dianut orang tua mereka, baik ketika Orde Baru masih memimpin ataupun setelahnya.

Penulis menemukan bahwa setelah peristiwa 1965, jenis diskriminasi yang sering dialami oleh keturunan eks-tapol PKI adalah penghilangan paksa yang dialami oleh mereka yang dianggap terkait dengan PKI, yaitu orang tua. Diskriminasi jenis kedua yang dirasakan oleh figur anak eks-tapol di dalam film ini adalah ancaman dengan senjata api atau tajam disertai perusakan secara paksa terhadap properti dan tempat tinggal. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengalami pembatasan dalam akses pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai salah satu haknya sebagai warga negara. Sedangkan diskriminasi yang paling umum yang didapat oleh anak-anak eks-tapol adalah pengucilan dari lingkungan sosial.

Di Indonesia, komunisme telah dibubarkan secara resmi sejak diterbitkannya TAP MPRS No. XXV/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme pada tanggal 5 Juli 1966. Sejak saat itu, PKI sudah tidak lagi ada karena Soeharto sebagai Presiden yang selanjutnya terpilih di tahun 1967 benar-benar menegakkan TAP tersebut dengan bantuan aparat keamanan.

Sekalipun di masa kontemporer Indonesia dianggap berada dalam keadaan yang demokratis, tetapi pada kenyataannya tidak semua isu boleh disuarakan secara bebas. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya demokrasi Indonesia memiliki batasan. Konflik antara PKI dan pemerintah di masa Orde Baru membuktikan adanya ketidak-harmonisan antara keberadaan PKI dan pemerintah. Ideologi PKI yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan demokrasi dianggap sebagai bahaya laten untuk keberlangsungan negara. Pemerintah dan masyarakat lebih memilih menghindari isu PKI. Dalam artian pemerintah menggunakan kuasanya untuk membatasi isu-isu tersebut untuk menekan posisi PKI secara *prejudice* (prasangka sosial) dengan tetap menjaga diskriminasi dan *stereotype* negatif atas PKI. Tidak ada diskusi yang terbuka dan setara secara dialogis antara pihak pemerintah dan PKI sehingga komunikasi menjadi satu arah.

Ada rentang waktu yang cukup jauh antara tahun 1965 hingga 2018. Generasi milenial yang lahir di tahun 1990an hingga 2000an tidak merasakan apa yang dirasakan oleh generasi sebelum mereka, yaitu kewajiban untuk menonton film doku-drama *Pengkhianatan G30S/PKI* (1984). Setelah tahun 1998 di mana Soeharto lengser, film tersebut tidak lagi menjadi daftar film wajib tonton dan tidak lagi disiarkan di televisi nasional secara serentak tiap tahunnya. Namun film tersebut masih bisa diakses dengan mudah melalui laman youtube.com.

Dengan tumpahan informasi dari segala penjuru maka tidak lagi relevan untuk menggambarkan bahwa *audience* generasi milenial adalah individu-individu yang pasif dan menerima secara langsung pesan yang disampaikan media sebagaimana teori jarum hipodermik yang masyur di tahun 1940an. Generasi milenial terbiasa aktif dan memiliki kebebasan dalam memaknai tiap pesan dari kegiatan konsumsi media yang mereka lakukan sesuai dengan latar belakang pengetahuan, politik, sosial dan ekonominya.

Bagi generasi milenial, PKI adalah hal yang asing. Awal persentuhan generasi milenial dengan sejarah PKI adalah di bangku sekolah ketika mereka belajar melalui buku sejarah di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Setelahnya mereka mengetahui cerita-cerita mengenai PKI dari artikel-artikel yang bersumber dari internet. Melalui pengakuan beberapa dari mereka, selepas mengenyam pendidikan di bangku SMA, mereka tidak memiliki ketertarikan dengan sejarah tersebut. Yang mereka tahu adalah PKI itu buruk dan jahat sebagaimana yang dideskripsikan di buku sejarah yang mereka baca.

Tanggapan yang mereka sampaikan tentang PKI setelah menonton kedua film dokumenter tersebut cenderung positif. Melalui film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007), generasi milenial menganggap bahwa stigmatisasi buruk mengenai PKI dan keturunannya merupakan kesimpulan yang diambil terlalu dini.

Dengan menonton kedua film dokumenter tersebut memberi mereka wawasan baru mengenai tragedi 1965/1966. Beberapa dari mereka menyayangkan bahwa permasalahan HAM tersebut belum tuntas hingga sekarang. Di lain sisi, mereka merasa bersyukur karena dengan menonton ini mereka mendapat informasi *alternative* yang diceritakan langsung oleh para pelaku sejarah, yaitu korban tragedi 1965/1966. Mereka kini memiliki pandangan baru mengenai peristiwa 1965 dan tragedi 1965/1966. Tak hanya memiliki wawasan baru, setelah menonton film ini, beberapa dari mereka mengaku bahwa pandangan mereka terhadap PKI berubah. Sebelumnya mereka menggeneralisir secara negatif bahwa semua penyintas, eks-tapol dan keluarganya adalah buruk dan jahat. Namun setelah menonton film dokumenter tersebut, para informan menjadi lebih positif dan terbuka terhadap wacana ini. Walaupun pada awalnya mereka menjadi bingung karena luapan informasi yang mereka dapat melalui film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007), berbeda sekali dari apa yang mereka yakini selama ini, bahwa apapun mengenai PKI adalah buruk dan berbahaya. Kedua film tersebut juga menyadarkan mereka betapa pentingnya untuk tidak terburu-buru mengambil suatu kesimpulan akan suatu hal, khususnya sejarah yang terjadi di masa lampau.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sutradara IGP Wiranegara, bahwa kedua film dokumenter tersebut yaitu *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007) menjadi

*healing* bagi para eks-tapol dan keluarganya yang menonton film tersebut. Proses *healing* atau penyembuhan akan trauma tersebut terjadi karena *audience* yang merupakan bagian dari peristiwa 1965 dan tragedi 1965/1966 merasa terwakili dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh para informan di dalam film. Selain itu IGP Wiranegara menyampaikan harapannya bahwa negara sesungguhnya perlu meminta maaf atas hal yang dilakukan oleh negara di masa lampau kepada para korban tragedi 1966. Cukup dengan meminta maaf, dan memberi pernyataan bahwa setelah peristiwa 1965 terjadi tragedi 1966 yang memakan korban dengan jumlah yang belum dapat dipastikan, dari pihak mereka yang memiliki atau dianggap memiliki kaitan dengan PKI. Menurutnya jika hal tersebut dilakukan, maka negara akan damai karena tidak akan ada lagi isu-isu yang diangkat menyoal PKI yang akan merongrong keamanan negara. Karena sesungguhnya PKI sudah lama mati dan para keturunannya tidak memiliki keinginan untuk menghidupkan komunisme, mereka hanya ingin hidup damai secara normal tanpa disemati stigma PKI.

Sedangkan produser film yaitu Putu Oka Sukanta berharap adanya upaya rekonsiliasi dari pemerintah, yaitu dengan saling menerima bahwa peristiwa 1965 dan tragedi 1965/1966 adalah milik Bangsa Indonesia sehingga seluruh elemen masyarakat dapat saling memaafkan dalam suasana persahabatan. Bagi Putu Oka Sukanta, kedua film ini adalah media penjernihan stigma negatif terhadap orang-orang PKI. Kedua film ini merepresentasikan, memproduksi makna baru, tentang para korban dan penyintas tragedi 1965.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap wacana tentang PKI yang diwacanakan melalui narasi-narasi yang ditampilkan di dalam dua film dokumenter pasca Orde Baru. Hasil pembacaan terhadap teks film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007) dengan metode *film discourse interpretation* milik Janina Wildfeuer (2014) menunjukkan adanya tawaran formasi diskursif yang berbeda dari versi resmi pemerintah Orde Baru mengenai PKI.

Dalam film *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007) wacana tentang PKI diartikulasikan melalui narasi yang dituturkan oleh ekstapol, penyintas, keluarga ekstapol, ulama, pengamat politik, serajahwan dan pengacara. Dalam kedua film tersebut wacana tentang PKI dinarasikan sebagai korban diskriminasi dan stigma setelah peristiwa 1965.

Dalam film *Menyemai Terang Dalam Kelam* (2006) dan *Tumbuh Dalam Badai* (2007) juga menyampaikan narasi upaya ekstapol dan keluarganya menghadapi diskriminasi dan stigma tersebut melalui cara berdamai dengan masa lalu, menghilangkan dendam kepada pemerintah Orba dan menata masa depan melalui pendidikan yang tinggi ataupun terjun ke dalam dunia seni yang dianggap dapat melunakkan sifat keras dan kasar.

Film dokumenter *Menyemai Terang Dalam Kelam* dan *Tumbuh Dalam Badai* diproduksi dan ditayangkan pada kondisi politik lebih tenang dan demokratis di masa Susilo Bambang Yudoyono. Karena kondisi politik yang demikian menyebabkan tidak ada tekanan yang berarti kepada isu-isu menyoal PKI dan kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk membahas sejarah 1965/1966.

Sebagaimana diungkapkan sutradara bahwa kedua film dokumenter tersebut seringkali diputar dan dibedah namun tidak pernah menghadapi upaya penjagalan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan diketahui bahwa kedua film dokumenter berhasil memberi mereka pengetahuan baru bahwa terdapat tragedi 1965/1966 setelah peristiwa 1965. Hal tersebut membuat para informan menjadi lebih terbuka terhadap informasi mengenai PKI, bahwa tidak semua mereka yang dianggap PKI terkait dengan PKI itu sendiri. Selanjutnya para informan mulai merubah sudut pandang mereka menjadi lebih positif terhadap para penyintas, ekstapol dan keluarganya. Hasil positif tersebut dapat dicapai selaras karena film tersebut ditayangkan pada *habitat* generasi milenial yang memiliki tingkat konsumsi informasi tinggi di mana pemikiran mereka lebih terbuka dan kritis.

## 7. Saran

Penelitian ini berfokus pada analisis teks untuk mengungkap alternatif wacana mengenai PKI di dalam dua film dokumenter yang disajikan melalui narasi-narasi di dalam film tersebut. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian ini dengan melakukan konfirmasi kepada *audience* mengenai interpretasi mereka terhadap *discourse* PKI yang diwacanakan oleh kedua film dokumenter tersebut atau film-film lain dengan tema yang serupa.

Selain itu demi memperkaya alternatif-alternatif lain mengenai wacana tentang PKI ini, penelitian selanjutnya dapat mempergunakan film-film dokumenter lain, film-film non-dokumenter yang bertema sama atau bisa juga teks-teks bacaan bertema serupa.

## References

- Cahyani, Dewi Y dan Hadi Tamim. 2015, '(Re)Konstruksi Memori: Tragedi 1965 dalam Film Indonesia Pasca Reformasi', Penelitian dana hibah prodi Universitas Udayana Denpasar.
- Casebier, Allan. *Film and Phenomenology: Toward a Realist Theory of Cinematic Representation*. Newyork: Cambridge University Press, 1991.
- Conroe, Andrew M. 2012, 'Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia, (Disertasi Program Doktorat yang dipublikasikan, The University of Michigan).
- Eriyanto. *Analisis Wacana – Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIs, 2009.
- Fitranisa, Intan. 2016, 'Membaca Film Indonesia Bertema Religi (Studi *Film discourse interpretation* Tentang Identitas Keislaman dalam Film 99 Cahaya di Langit Eropa dan Haji Backpacker)', (Tesis Program Magister yang tidak dipublikasikan, Universitas Airlangga Surabaya).
- Irawanto, Budi. *Film, Ideologi, dan Militer*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Kurasawa, Aiko *et al.* *Consuming Indonesia: Consumption in Indonesia in The Early 21st Century*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kurniawan, *et al.* *Pengakuan Algojo 1965: Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965*. Jakarta: Tempo Publishing, 2014.
- Purwantari. 2010, 'Representasi Tragedi 1965 dalam Film (Antropologi Media dan Film-Film Bertema Tragedi 1965', (Tesis Pascasarjana yang dipublikasikan, Universitas Indonesia Jakarta).
- Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme.
- Wildfeuer, Janina. *Film Wacana Interpretation: Toward a New Paradigm for Multimodal Film Analysis*. Newyork: Routledge, 2014.